

# PENGARUH BENCANA TSUNAMI TERHADAP PENINGKATAN SOFT POWER DIPLOMACY BAGI PEMERINTAHAN PROVINSI ACEH TAHUN 2004-2015

**Risky Novialdi**

Magister Ilmu Hubungan Internasional  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  
Yogyakarta, Indonesia  
Email: Richer.ricky@yahoo.com

Abstrak-Kajian tentang bencana alam sudah banyak dilakukan dalam banyak studi. Beberapa tahun terakhir bencana juga dikaji terkait kaitannya antara bencana dengan dampak terhadap politik. Bencana tsunami Aceh salah satunya yang memberikan dampak politik terhadap sebagian besar permasalahan di Aceh, mulai dari kasus separatism dan juga diplomasi dalam mewujudkan kerjasama antara aceh dengan pihak luar yang di dalam negeri dan juga luar negeri. Penelitian ini menggunakan metode kualitative research yang bertujuan mengungkapkan tentang dampak bencana tsunami terhadap peningkatan soft power diplomacy Aceh. Berdasarkan penelitian ini menunjukkan bahwa bencana tsunami telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kuantitas dan kualitas diplomasi pemerintahan provinsi Aceh. Bahkan bencana tsunami telah melahirkan perdamaian dan keamanan di Aceh lebih baik dari kondisi Aceh sebelum bencana tsunami. Dari bencana tsunami ternyata soft power diplomasi Aceh meningkat pesat. Soft power diplomacy dalam penelitian ini dipahami adalah sebuah kekuatan yang dipakai oleh sebuah pihak dalam memuluskan kepentingan tanpa suap (bayaran) dan juga paksaan. Sehingga soft power tidak hanya dimiliki oleh pemerintah pusat namun juga dimiliki oleh pemerintah daerah.

**Kata Kunci :** *Soft power Diplomacy, Tsunami, Disaster Diplomacy*

## I. PENDAHULUAN

Bencana memang memberikan duka yang mendalam bagi sebagian besar umat manusia. Hal ini dikarenakan bencana memberikan kerugian yang cukup besar terhadap materil juga immaterial. Di Indonesia, salah satu bencana terbesar terjadi pada tahun 2004 yang melanda Nanggroe Aceh Darusalam, yaitu Bencana tsunami.

Selama hampir setahun, bencana ini seakan tidak memberikan dampak positif sama sekali, dan hanya memberikan duka yang mendalam bagi masyarakat Aceh. Namun setahun setelah bencana tsunami ini, dampak positifnya mulai terlihat, karena mampu menyelesaikan konflik di tanah Aceh. Tsunami yang sebelumnya dianggap sebagai bencana sekarang bisa berubah menjadi berkah dengan menjadikan bencana tsunami sebagai dorongan untuk dilangsungkannya perundingan damai antara GAM dan RI, yang telah berkonflik lebih dari 30 tahun. Ilan

kelman dalam bukunya *Disaster Diplomacy*, 2012, menjelaskan tentang terjadinya bencana tsunami yang mendukung terjadinya perundingan GAM dan RI di Helsinki tahun 2005.

Bencana Tsunami menjadi alat diplomasi yang sangat efektif dan secara aktif mewujudkan kesepakatan dalam perundingan. Berdiplomasi bukan sesuatu yang baru bagi kehidupan masyarakat Aceh. Hal ini dikarenakan, sejak masa kerajaan Aceh abad ke 16, Kerajaan Aceh telah melakukan hubungan diplomatik dengan pihak-pihak luar, baik itu di kawasan Nusantara maupun juga di mancanegara. Mengenai sejarah diplomasi di Aceh pada masa kerajaan ini telah ditulis secara sistematis oleh H.M. Nur El Ibrahimy dalam karyanya yang berjudul “*Selayang Pandang Langkah Diplomasi Kerajaan Aceh*”. Dalam buku ini dijelaskan tentang hubungan-hubungan diplomatik yang dilakukan oleh kerajaan Aceh dengan pihak luar seperti Amerika, Turki, Perancis, dan Singapura. Hubungan diplomatik ini dilakukan dalam rangka mempertahankan diri dan mencari bantuan akibat serangan yang dilakukan oleh Belanda.<sup>1</sup>

Jauh melewati masa-masa tersebut, pada abad ke 19 dan 20, Aceh resmi bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pada masa awalnya, segala bentuk hubungan diplomatik dengan luar negeri hanya dilakukan oleh pemerintah pusat saja. Namun kemudian pemerintah pusat memberikan wewenang bagi pemerintah daerah untuk melakukan hubungan luar negeri, berupa kerjasama dan lain sebagainya. Salah satu daerah yang mempunyai wewenang ini adalah provinsi Aceh, ditambah lagi dengan penguatan dari hasil penandatanganan MoU Helsinki pada tahun 2005, membuat pemerintah Aceh mempunyai peluang besar dalam mengelola sendiri pemerintahannya termasuk dalam melakukan hubungan luar negeri dengan daerah di Negara lain, namun hal ini tetap dalam sistem pemerintahan Indonesia.

Pengakuan sifat istimewa dan khusus oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia kepada Aceh sebenarnya telah melalui perjalanan waktu yang panjang. Tercatat setidaknya ada tiga peraturan penting yang pernah diberlakukan bagi keistimewaan dan kekhususan Aceh yaitu Keputusan Perdana Menteri Republik

<sup>1</sup> Nur El Ibrahimy, *Selayang Pandang Langkah Diplomasi Kerajaan Aceh*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1993. Hal xii

Indonesia Nomor I/Missi/1959 tentang Keistimewaan Provinsi Aceh, UU 44/1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh, dan UU 18/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Aceh. Dengan dikeluarkannya UU Pemerintahan Aceh<sup>2</sup> pada tahun 2006, diharapkan dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan di Aceh, untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan yang berkeadilan dan keadilan yang berkesejahteraan di Aceh. Termasuk dalam melangsungkan hubungan diplomatik dengan daerah di Negara lain.

Dalam rangka melakukan hubungan diplomasi dengan daerah di luar negeri, bisa dilakukan dalam bingkai kerjasama kota kembar (*sister city/province*). Kegiatan ini dilaksanakan dengan cara pemda bersinergi dengan pemerintah pusat untuk merekatkan hubungan antar berbagai bangsa di dunia. Hubungan antara bangsa yang bisa terjalin tanpa bersifat politis (*non politic action*), secara tidak langsung juga akan mempererat hubungan dari kedua Negara (pemerintah pusat).

Diplomasi yang handal memerlukan konektivitas dan berpikir *out of the box*.<sup>3</sup> Duta besar RI untuk Amerika Serikat, Dino Patti Djalal, menyatakan bahwa Indonesia mempunyai banyak potensi untuk dijual.<sup>4</sup> Tinggal bagaimana diplomatnya dapat menjualnya dengan baik. Menurutnya, kita (Indonesia) mempunyai tiga asset utama sebagai unggulan, kita adalah Negara demokrasi ketiga terbesar di dunia, berpendudukan muslim terbanyak, dan kita adalah *super power* lingkungan dengan hutan tropis yang luas.<sup>5</sup> Selain dari itu, Indonesia adalah Negara dengan rawan bencana tertinggi di dunia, apabila hal ini dapat dikelola dengan baik, maka juga akan bisa digunakan sebagai alat diplomasi. Sebagai contoh Bencana tsunami yang pernah melanda Aceh.

Gempa dan tsunami di Aceh terjadi pada tanggal 26 Desember 2004 yang telah menyebabkan korban meninggal lebih dari 200.000 orang di berbagai Negara. Gempa yang terjadi di Aceh ini adalah gempa terbesar selama 40 tahun terakhir.<sup>6</sup> Bencana Tsunami adalah salah satu musibah yang mengandung duka, namun juga “berkah” yang mampu melahirkan perundingan antara GAM dan RI. Bahkan Ilan Kelman dengan penuh keyakinan memasukkan kasus konflik GAM dan RI dalam salah satu sub bab dalam bukunya, yang berjudul *Disaster Diplomacy “How Disasters Affect Peace and Conflict.”* Dia berpendapat bahwa kesepakatan yang terjadi antara GAM dan RI adalah salah satu bukti sebuah bencana bisa dijadikan alat untuk diplomasi dalam mewujudkan perdamaian.

<sup>2</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Daerah\\_khusus](https://id.wikipedia.org/wiki/Daerah_khusus). Diakses pada 28 Februari 2016

<sup>3</sup> Takdir Ali Mukti, *Paradiplomasi “Kerjasama Luar negeri oleh PEMDA di Indonesia”*, The Phinisi Press, Yogyakarta, 2013

<sup>4</sup> Menjual yang dimaksud bukan dalam arti menjual harga diri Negara atau bangsa, melainkan banyak hal yang dapat digunakan sebagai sarana untuk mempengaruhi dan menjalin hubungan diplomatik dengan bangsa atau Negara lain

<sup>5</sup> Ibid

<sup>6</sup> Nanin Trianawati sugito, ST., MT. *Tsunami*, Universitas pendidikan Indonesia, 2008. Hal 31

Setelah terjadi bencana Tsunami, Aceh juga kemudian mempunyai kekuatan baru dalam berdiplomasi ketika melakukan kerjasama luar negeri. Di antaranya yang paling terkenal adalah hubungan kerjasama antara Aceh dengan Jepang<sup>7</sup> dan Swiss dalam proses pembangunan setelah adanya kerusakan besar akibat bencana tsunami. Bencana tsunami secara langsung juga mempengaruhi *soft power diplomacy* bagi pemerintahan Aceh, dalam menjalin hubungan dan mencapai kesepakatan dengan daerah lain.

*Soft Power diplomacy* akan lebih mudah mencapai kesepahaman dan kesepakatan apalagi kedua daerah memiliki permasalahan yang sama, tentu kekuatan ini sangat menarik untuk meningkatkan kerjasama asing untuk mewujudkan pembangunan daerah, terutama Aceh setelah dilanda bencana tsunami.

Bedasarkan dari paparan di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang bagaimana pengaruh bencana tsunami terhadap pemerintahan Aceh dalam meningkatkan *soft power* Diplomasinya di tingkat lokal maupun Internasional. Dengan Alasan tersebut maka penulis akan mengambil judul untuk penelitian ini: Pengaruh Bencana Tsunami Terhadap Peningkatan *Soft Power Diplomacy* Bagi Pemerintahan Provinsi Aceh tahun 2004-2015.

#### A. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang di atas, maka diambil rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana Pengaruh Bencana Tsunami terhadap peningkatan *soft power Diplomacy* bagi Pemerintahan provinsi Aceh tahun 2004-2015?

#### B. Tujuan Riset

Tujuan merupakan alasan utama dilakukannya suatu penelitian, dimana hasil penelitian yang diperoleh berdasar pada kerangka berfikir ilmiah. Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis adalah untuk:

1. Untuk mengetahui Kebenaran bahwa Tsunami memang telah menjadi alat diplomasi bagi pemerintahan Aceh.
2. Untuk mengetahui lebih lanjut dimana saja peluang diplomasi bencana ini bisa digunakan.
3. Untuk mengetahui apakah tsunami memang mempengaruhi *soft power diplomacy* bagi pemerintahan Aceh.

#### C. Studi Pustaka

Kajian tentang diplomasi bencana merupakan bukan suatu hal yang baru dalam dunia akademisi. Sudah banyak peneliti yang membahas tema ini dari sudut pandang yang berbeda-beda. Namun tidak begitu dengan di dunia praktis, diplomasi bencana masih sulit dipahami bagi sebagian kalangan, baik itu pejabat pemerintahan, begitu juga dengan masyarakat. Apalagi jika disandingkan dengan istilah “kapilatisasi bencana”, hal ini bisa langsung ditolak. Meskipun demikian, para akademisi terus

<sup>7</sup> <http://www.acehprov.go.id/news/read/2015/11/27/2778/gubernur-kerjasama-aceh-jepang-terjalin-karena-kesamaan-karakter-geologis.html>, Diakses pada 27 Februari 2016

mengkaji tema ini secara mendalam, Sebagaimana yang dituliskan oleh Andi Amitya Resty Dwiyantri, dalam tesisnya yang berjudul “Peran Diplomasi bencana Alam dalam Praktik Paradiplomasi” yang mengambil studi kasus dari tempat asalnya sendiri yaitu Sulawesi Selatan.<sup>8</sup>

Dalam karyanya tersebut, Amitya mengkritisi tentang kinerja penanggulangan bencana di Sulawesi Selatan, dan mengharapkan ada perubahan yang semula hanya berupa aksi cepat tanggap menjadi pengurangan resiko dengan melakukan kerjasama dengan pihak-pihak luar yang lebih mapan dalam hal penanggulangan bencana. Pengurangan resiko bencana apabila dapat dilaksanakan dengan baik akan menekan jumlah korban menjadi lebih sedikit. Salah satu kerjasama dalam lingkup paradiplomasi yang telah dilakukan oleh pemerinatahan Sulawesi selatan adalah dengan *Australia Indonesia Facility for Disaster reduction (AIFDR)*.<sup>9</sup> Dalam penelitiannya Amitya juga memaparkan bahwa masih banyaknya pejabat daerah yang belum mengerti dan mengetahui bahwa pemerintah daerah boleh melakukan kerjasama dengan pihak asing dengan inisiatif dari daerah itu sendiri, tidak harus dimulai oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah bisa bersinergi dengan pemerintah pusat untuk menjalin hubungan dengan pihak asing, untuk kepentingan daerah itu sendiri.

Selain itu ada juga yang menulis dengan konsentrasi yang sama, yaitu jurnal penelitian dari Dr. Surwandono dan Ratih Herningtyas dalam karya yang berjudul, *Diplomasi bencana alam sebagai sarana kerjasama internasional*.<sup>10</sup> Dalam penelitian ini disebutkan tentang peluang-peluang yang dimiliki Indonesia jika dapat mengkapitalisasikan bencana. Indonesia dengan potensi bencana yang cukup besar dapat menjalin hubungan luar negeri, dalam bentuk kerjasama untuk menanggulangi bencana atau kerjasama di bidang lainnya seperti kerjasama peningkatan teknologi dan pertukaran informasi.

Hubungan internasional seringkali mengalami stagnasi dalam lingkaran siklus balas membalas kebijakan, sehingga bencana alam yang datang tiba-tiba di suatu Negara akan dipahami sebagai peluang untuk melalui siklus baru berdasarkan kerjasama. Snyder menyebutkan bahwa Diplomasi bencana alam antar negara yang bertujuan untuk meningkatkan *soft power* juga menjadi kajian yang menarik, karena *soft power* dapat diraih sebagai hasil diplomasi bencana alam. *Soft power* sendiri adalah konsep yang dipopulerkan Joseph Nye, yang bermakna kemampuan suatu pihak untuk memperoleh kepentingannya tanpa dengan koersi atau paksaan (J. S. Nye, 2008: 29).<sup>11</sup>

Negara yang memilih *soft power* sebagai basis kekuatan diplomasi, lebih menggantungkan pada

kemampuannya untuk bekerjasama dalam mewujudkan tujuan. Strategi diplomasi ini ditelaah lebih efisien secara biaya daripada strategi “*carrot and stick*” yang berbasis paksaan. Negara yang banyak memberikan bantuan dalam penanganan bencana akan dihormati dan dituakan. Hal ini secara tidak langsung akan meningkatkan posisi tawar negara pemberi bantuan tersebut dalam interaksi internasional. Sementara itu timbal balik kerjasama yang saling menguntungkan sering muncul setelah diplomasi bencana alam dilakukan.<sup>12</sup>

Dalam Praktiknya, Diplomasi Bencana alam lebih bersifat politis, sedangkan untuk kerjasama terkait bencana alam lebih bersifat teknis, dan ketika yang bersifat teknis bermuatan politis maka disinilah disebut sebagai proses diplomasi. Secara tersirat, bencana juga akhirnya dapat menjadi kekuatan dalam memulai sebuah kerjasama dalam wujud diplomasi baik itu dalam praktik teknis ataupun politis atau juga kombinasi keduanya.

Selanjutnya, ada penelitian yang dilakukan oleh Ilan Kelman dengan tulisannya yang berjudul *Disaster Diplomacy, How Disaster affect peace and conflict*(2012). Bisa dikatakan penelitian Kelman adalah yang paling berpengaruh dalam memperkenalkan tentang diplomasi bencana kepada masyarakat internasional. Dalam bukunya Kelman menjelaskan tentang praktek diplomasi bencana yang telah dilakukan di dunia, seperti kesuksesan *disaster diplomacy* antara Amerika dan Quba, Iran dan USA, Yunani dan Turki, Eritrea dan Ethiopia dan juga dalam kasus perdamaian konflik Aceh.<sup>13</sup>

Penelitian Ilan Kelman ini cukup luas namun tidak mendalam, mengingat banyaknya topik yang diangkat. Namun keluasan pembahasannya ini cukup memberikan inspirasi bagi penelitian selanjutnya. Ilan Kelman juga membahas tentang bagaimana *disaster diplomacy* ini dapat berjalan dengan baik, salah satunya dibutuhkan dukungan dari media. Kelman menyebutkan:

*The Media are often particularly prominent in lobbying for disaster diplomacy. Than can go too far, possibly to the point where expectations are raised beyond realistic outcomes, as occurred for India-Pakistan in 2001. That could also go to the point where decision-maker react adversely to suggestions on how they should act vis-à-vis disaster diplomacy, as occurred for Iran-USA after the 2003 earthquake. Rather than spurring them toward disaster-related peace, the leader might go out of their way to avoid dealing with an enemy. This action would show that they do not need disaster-related assistance and they will never compromise their ‘principles’ by collaborating with a nemesis.*<sup>14</sup>

Ilan Kelman juga membahas tentang diplomasi lingkungan (*environmental diplomacy*) dan juga *disaster para-diplomacy*.<sup>15</sup> Kedua konsep ini muncul akibat perkembangan dari *disaster diplomacy* yang lingkungannya

<sup>8</sup> Andi Amitya Resty Dwiyantri, dalam tesisnya yang berjudul “Peran Diplomasi bencana Alam dalam Praktik Paradiplomasi”, Thesis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2014

<sup>9</sup> Ibid

<sup>10</sup> Ratih Herningtyas dan Surwandono, *Diplomasi Bencana Alam sebagai Saran Meningkatkan Kerjasama Internasional*, Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

<sup>11</sup> Ibid

<sup>12</sup> Ibid

<sup>13</sup> Kelman, Ilan, *Disaster Diplomacy ‘How Disaster affect Peace and Conflict*, New York, Routledge, 2012. Hal 20-40

<sup>14</sup> Ibid. Hal 148-149

<sup>15</sup> Ibid. hal 119-122

bisa terus diperluas, karena kajian tentang diplomasi bencana, dengan sendirinya akan berkaitan dengan bidang-bidang lain.

Dari ketiga penelitian di atas telah menunjukkan bahwa tema tentang diplomasi bencana bukan suatu hal yang baru, akan tetapi yang membuat perbedaan penelitian dari penulis dengan ketiga penelitian di atas adalah penelitian kami akan lebih memfokuskan diri di pemerintahan Aceh saja, yang notabeneanya memiliki kewenangan lebih dari pemerintah pusat dalam menjalankan pemerintahannya dan juga dalam menjalin kerjasama dengan pihak asing. Selain itu penulis juga akan memfokuskan pada bencana tsunami yang terjadi tahun 2004 di kota Banda Aceh, yang merupakan ibu kota provinsi Aceh. Untuk lebih memperdalam lagi, penulis juga akan meneliti peningkatan *soft power diplomacy* dalam diri pemerintahan Aceh setelah bencana tsunami terjadi.

#### G. Kerangka Teoritik

Sir Ernest Satow sejak tahun 1922 telah mendefinisikan diplomasi sebagai aplikasi intelijen dan taktik untuk menjalankan hubungan resmi antara pemerintah yang berdaulat, yang kadangkala diperluas dengan hubungan dengan negara-negara jajahannya. Sejalan dengan dengan definisi Satow, Barston mendefinisikan diplomasi sebagai manajemen hubungan antar Negara atau hubungan antar aktor-aktor hubungan internasional lainnya.<sup>16</sup>

Menurut Pannikar dalam bukunya *The Principle and Practice of Diplomacy*, beliau menyatakan, *diplomasi dalam hubungannya dengan pihak internasional adalah seni mengedepankan kepentingan suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain.*<sup>17</sup>

Diplomasi bertujuan agar pembicaraan mengenai berbagai masalah mencapai kesepakatan yang sesuai atau sekurangnya tidak terlalu merugikan kepentingan nasional masing-masing. Unsur pokok dalam diplomasi adalah negosiasi. Menurut Herb Cohen, *Negosiasi adalah penggunaan informasi dan kekuatan untuk mempengaruhi sikap dalam suatu "jaringan ketegangan"*. Maka dari itu negosiasi ini dilakukan bisa saja menyangkut hajat hidup orang lain dan juga kehidupan pribadi.<sup>18</sup>

Seiring kemajuan teknologi, terdapat perubahan dalam segi aktor internasional dan juga sarana yang digunakan dalam menjalin sebuah kerjasama luar negeri. Termasuk salah satunya adalah penggunaan bencana alam dalam menjalin sebuah kerjasama internasional atau yang sering disebut dengan *Disaster Diplomacy*.

#### 1. *Disaster Diplomacy* (Diplomasi Bencana)

Diplomasi bencana menggabungkan dua kata yang cukup umum. Definisi Oxford Dictionary dari 'bencana' adalah kecelakaan tiba-tiba atau bencana alam

yang menyebabkan kerusakan besar atau korban jiwa. Kata kedua, 'diplomasi', Pada tingkat dasar itu kontras dengan perang yang mana diartikan sebagai sisi damai politik, di mana negosiasi adalah jalan pilihan untuk perubahan.

Ketika dua kata dipakai dalam waktu yang sama, merupakan sebuah upaya untuk melahirkan sebuah gagasan baru tentang bagaimana sebuah bencana bisa digunakan untuk sarana berdiplomasi di tingkat Internasional. Salah satu tokoh yang mendukung perkembangan gagasan ini adalah berasal dari Ilan Kelman, yang berkontribusi banyak berupa laporan dan artikel tentang diplomasi bencana, semua yang memuncak dalam bukunya yang dipublikasi pada 2012 tentang diplomasi bencana, *Disaster Diplomacy 'How disaster affect peace and conflict'* (Diplomasi Bencana: Bagaimana Bencana Mempengaruhi Perdamaian dan Konflik).<sup>19</sup>

Pandangan Kelman tentang dunia diplomasi bencana adalah bagaimana sebuah bencana bisa memberikan kesempatan/peluang untuk melakukan sebuah kerjasama dalam membangun perdamaian. Peluang ini menampakkkan diri di waktu baik sebelum dan sesudah bencana, yang berarti bahwa setiap kerjasama terkait bencana dipahami untuk menjadi bagian dari diplomasi bencana. Sebagai gambaran aktivitas pra-bencana, Salah satu contoh sukses dari kerjasama dari basis bencana adalah kolaborasi ilmuwan Amerika dan Kuba terhadap penyediaan sistem pemantauan badai. Pada dasarnya, Amerika dan Kuba adalah Negara yang saling bermusuhan, namun karena ada permasalahan yang sama, yaitu badai, maka bisa digunakan sebagai alat diplomasi menuju perdamaian.

#### a. Penilaian Sukses *Disaster Diplomacy*

Diplomasi ini mengenai bagaimana cara agar kita mampu mengubah situasi.<sup>20</sup> Kelman menemukan bahwa diplomasi bencana biasanya menghasilkan dampak sebagai berikut: jangka pendek, jangka panjang, dan efek sebaliknya dari yang diinginkan. Hasil jangka pendek terjadi ketika bencana menyediakan jalan baru untuk negosiasi antara pihak yang bermusuhan. Namun, untuk ini akan menjadi sukses perlu ada landasan yang ada untuk negosiasi. Hasil jangka panjang adalah prasangka baik yang sudah ada merupakan faktor kuat dalam diplomasi. Yang dimaksud dengan efek sebaliknya adalah disebabkan kedekatan selama kerjasama penanggulangan bencana memudar, dan konflik kembali terjadi. Terlepas dari hasil yang berpotensi negatif, kenyataannya tetap respon terhadap bencana biasanya membawa masyarakat yang bermusuhan menjadi damai, meskipun untuk beberapa saat.

Kesuksesan dari sebuah diplomasi bencana dapat dipahami adalah ketika pihak-pihak yang bertikai dapat meninggalkan perselisihan mereka dan melihat iktikad baik dari kedua belah pihak untuk membangun sebuah hubungan baru dalam konsep perdamaian.

<sup>16</sup> Sukawarsini Djelantik, *Diplomasi antara teori dan praktik*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2008. Hal 3-4

<sup>17</sup> S.L Roy, *Diplomasi*, PT Raja Grafindo Persada: Jakarta. 1995. Hal. 4

<sup>18</sup> Herb Coben, *Negosiasi*, Pantja Simpati: Jakarta, 1986. Hal. 14

<sup>19</sup> Op.Cit, Kelman, Ilan, *Disaster Diplomacy* ..... , 2012

<sup>20</sup> Athur Clarke, An Intrview With Ilan Kelman : Article

## b. *Disaster Diplomacy* di Aceh

Provinsi Aceh terletak di provinsi barat laut Sumatera, Indonesia, dan merupakan salah satu daerah dengan dampak paling parah akibat tsunami 2004. Selain itu, menurut catatan sejarah, Aceh telah menjadi salah satu daerah konflik sejak pemberontakan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dibentuk pada tahun 1976. Pemberontakan pertama dengan cepat ditekan, tetapi GAM semakin dikenal karena pelanggaran hak asasi manusia yang banyak disebabkan oleh militer. Perlawanan terus berlanjut sampai tahun 1998 ketika kediktatoran militer Suharto berakhir, ditambah dengan pemerintahan-pemerintahan selanjutnya yang tetap menggunakan cara militer.

Ketika Tsunami terjadi, tiga peristiwa penting meletakkan dasar yang kuat untuk kemungkinan perdamaian. Yang pertama adalah de-militerisasi Indonesia. Yang kedua terjadi ketika DPR mengesahkan undang-undang pada tahun 2004, yang mana UU tersebut diperlukan militer untuk melepaskan semua usaha aktifitasnya. Yang ketiga terjadi ketika militer tidak lagi mampu untuk memesan kursi di parlemen. Hasilnya adalah perjanjian perdamaian abadi yang ditandatangani pasca tsunami dalam bentuk MoU antara pemerintah RI dengan GAM di Helsinki pada 2005.

## 2. Paradiplomasi

Sebagaimana *disaster diplomacy*, Para diplomasi juga masih merupakan fenomena baru dalam kajian hubungan internasional. Paradiplomasi mengacu pada perilaku dan kapasitas melakukan hubungan luar negeri dengan pihak asing yang dilakukan oleh entitas 'sub-state', dalam rangka kepentingan mereka secara spesifik. Istilah paradiplomasi pertama kali diluncurkan dalam perdebatan akademik oleh ilmuwan asal Basque, Panayoyis Soldatos tahun 1980-an sebagai penggabungan istilah '*parallel diplomacy*' menjadi '*paradiplomacy*', yang mengacu pada makna '*the foreign policy of non central governments*', menurut Aldecoa, Keating dan Boyer. Istilah lain yang dilontarkan oleh Ivo Duchacek untuk konsep ini adalah '*Micro Diplomacy*'.<sup>21</sup>

Dalam perkembangan aktor dalam kerjasama Internasional, tidak lagi hanya diperankan oleh pemerintah pusat, melainkan pemerintah daerah sudah mulai mengambil peran dengan melewati batas-batas Negara mereka, namun juga ada ketentuan dari pusat Negara, yang ketentuan ini di setiap Negara-negara di dunia mempunyai peraturan yang berbeda. Dari penjelesan ini maka disimpulkan bahwa pemerintah daerah, terlebih daerah yang mempunyai perlakuan khusus dan istimewa juga harus mempunyai keahlian dalam berdiplomasi juga dalam peningkatan *soft power diplomacy*-nya.

### a. *Disaster Para-Diplomacy*

<sup>21</sup> Dikutip dari buku Crikemas, David, *Are The boundaries between Paradiplomacy and diplomacy watering down?* .... Dalam buku "*Paradiplomacy*" .... Takdir Ali Mukti Hal. 37-38

Dari kolaborasi antara diplomasi bencana dengan paradiplomasi ini, penulis akan mengidentifikasi peluang dari kerjasama antara pemerintah Aceh dengan pihak asing. Sehingga dapat disimpulkan tentang peran bencana tsunami terhadap peningkatan *soft power diplomacy* bagi pemerintah Aceh.

Dalam bukunya Ilan Kelman, *Disater Dipolmacy*, beliau juga sedikit membahas tentang *disaster-para diplomacy*, yakni diplomasi yang dapat dilakukan oleh pihak sub-national. Ilan Kalman menyebutkan:

*Disaster Para-Diplomacy explores Disaster diplomacy for non-sovereign jurisdictions. That is, sub-national entities interacting directly with foreign governments or international organizations for disaster-related activities.*<sup>22</sup>

### b. *Soft Power Diplomacy*

*Soft Power Diplomacy* adalah sebuah konsep diplomasi non tradisional yang mulai berkembang pasca abad ke-21. Salah satu tokoh yang paling terkenal dengan munculnya *soft power diplomacy* ini adalah Joseph Nye, Jr (1990).<sup>23</sup> *Soft Power Diplomacy* atau *soft diplomacy* ini diartikan sebagai pertukaran gagasan, informasi, seni dan aspek-aspek kebudayaan lain antara Negara dan bangsa, dengan harapan dapat menciptakan pengertian bersama. Keberhasilan *soft power diplomacy* ini sangat bergantung pada reputasi pelaku dalam komunitas internasional serta pertukaran informasi di antara para pelaku.<sup>24</sup>

*Soft diplomacy* bersumber dari *soft power diplomacy* sebagai lawan kata dari *hard power diplomacy*. *Soft Power* adalah kemampuan untuk mendapatkan apa yang diinginkan oleh suatu Negara (daerah) melalui penampilan bangsa itu di mata Negara lain, bukan dengan jalan pemaksaan atau dengan pembayaran. Inti dari *soft power* adalah eksplorasi kekuatan kebudayaan suatu bangsa yang bersifat non perang dan non pengikatan secara ekonomi, sebagai metode sekaligus alat untuk melakukan diplomasi dengan Negara<sup>25</sup> atau daerah lain.

Dalam perkembangannya, *Soft Power* ini bisa melingkupi banyak hal yang ada di suatu daerah, termasuk bencana yang kemudian bisa digunakan sebagai alat berdiplomasi. Provinsi Aceh adalah salah satu daerah dengan peluang besar untuk menggunakan *soft power* ini dengan menggunakan bencana tsunami sebagai alat berdiplomasi dengan daerah di Negara lain.

Dengan menggunakan beberapa kerangka teori ini diharapkan mampu menganalisa dan menemukan hasil yang sistematis terkait tema yang diambil, yaitu penggunaan bencana alam sebagai sarana peningkatan *soft power diplomacy* bagi pemerintahan provinsi Aceh.

<sup>22</sup>Kelman, Ilan, *Disaster Diplomacy* ..... Hal. 122

<sup>23</sup> <http://www.porosilmu.com/2015/02/memahami-konsep-soft-power-diplomacy.html>, Diakses pada 27 Februari 2016

<sup>24</sup> Dikutip dari Asisten Deputi Bidang pelaksanaan dan pelaporan persidangan, Thanon Aria Dewangga, dalam buku karya Takdir Ali Mukti, *Paradiplomasi*, ..... Hal 171

<sup>25</sup> Ibid. hal 172

## II. METODE PENELITIAN

Untuk mendukung sistematika penulisan yang baik dan hasil penelitian yang baik pula, maka dibutuhkan sebuah metode yang sesuai dengan tema dan konsentrasinya yang dipilih. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metodologi penelitian sebagai berikut:

### 1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif bertujuan untuk menggambarkan fakta-fakta yang terjadi di Aceh setelah bencana tsunami dan pengaruhnya terhadap peningkatan *soft power diplomacy* pemerintah Aceh.

### 2. Lokasi dan jangkauan penelitian

Untuk menghindari pelebaran pembahasan, maka penulis hanya akan memfokuskan pembahasan untuk provinsi Aceh pada tahun 2004-2015. Selain itu, penelitian ini juga akan fokus pada bencana tsunami saja tidak untuk bencana-bencana lain.

### 3. Metode pengumpulan data

Untuk data Primer, Penulis akan langsung melakukan observasi dan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan tema ini, yaitu para pejabat atau pegawai di bidang BKPM provinsi Aceh. Untuk tambahan, pengumpulan data juga dilakukan dengan menggunakan teknik studi pustaka (*library research*), sehingga menghasilkan data-data sekunder. Data tersebut akan diambil dari buku-buku literatur, kitab-kitab, laporan-laporan hasil penelitian sebelumnya, jurnal, majalah, dokumen, surat kabar, dan lain-lain yang relevan dengan penelitian ini.

### 4. Teknik analisis data

Setelah seluruh data terkumpul, maka kemudian akan dilakukan analisis terhadap data-data tersebut dengan teknik kualitatif, dimana permasalahan digambarkan berdasarkan fakta-fakta yang kemudian dikaitkan antara fakta satu dengan yang lainnya. Selanjutnya dari hasil analisis, penulis akan berusaha untuk menjelaskan tentang pengaruh-pengaruh dari bencana tsunami terhadap diplomasi, baik itu dalam menyelesaikan perundingan antara GAM dan RI dan juga dalam kerjasama *sister city* dalam mewujudkan pembangunan Aceh, dan yang paling utama adalah peningkatan *soft power diplomacy* bagi pemerintah Aceh.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Harold dan Margaret Sprout (1957), menganalisis tentang hubungan manusia dengan lingkungan (*Man-milieu relationship*). Menurut mereka, ada lima macam hubungan pengaruh-mempengaruhi antara dua hal ini (Manusia dan Lingkungan).<sup>26</sup> *Pertama, environmental determinism*, di mana lingkungan mempunyai

pengaruh mutlak terhadap manusia. Manusia tidak mempunyai pilihan lain kecuali mengikuti kehendak lingkungan. Sebagai contoh, kesuksesan Inggris dan Jepang dalam mengatur pertahanan, mereka mengambil kebijakan sesuai letak geografis dan merupakan tuntutan lingkungan yang mengharuskan mereka bertindak demikian.

Kedua, hubungan *free-will environmentalism*, di mana lingkungan mempunyai pengaruh kuat pada manusia, akan tetapi manusia masih mempunyai pilihan, untuk melakukan hal tersebut atau memilih melakukan hal yang lain. Dari tanda-tanda alam menuntun mereka untuk melakukan suatu, orang yang bijak akan dapat memperhatikan tanda-tanda ini dan akan melakukan sesuai tuntunan alam.

Ketiga, *environmental possibilism*, yang menganggap lingkungan sebagai matriks yang membatasi hasil operasional keputusan. Pengaruh *milieu* tergantung pada situasi dan kondisi yang meninggalkan sedikit ruang untuk memilih. Keterbatasan teknologi misalnya, keterbatasan ini akan membuat manusia mempunyai sedikit pilihan. Akan tetapi apabila manusia melakukan pengembangan teknologi, maka pilihan akan lebih banyak.

Keempat, *cognitive behavioralism*, manusia bereaksi terhadap lingkungan sebagaimana ia mempersepsikan dan menginterpretasikan berdasarkan pengalaman masa lampau. Dalam hubungan antara manusia dan lingkungan ini lebih ditentukan oleh bagaimana manusia mengambil keputusan berdasarkan pertimbangannya, bukan dari tuntutan lingkungan.

Kelima, *environmental probabilism*. Asumsi dasar hubungan ini adalah setiap keputusan yang bersifat hipotetik. Manusia memutuskan sesuatu berdasarkan pada perilaku yang secara normal akan diharapkan terjadi.

Manusia dan lingkungan mempunyai hubungan yang sebenarnya tidak dapat dipisahkan, kesuksesan manusia akan lebih baik jika bertindak sesuai dengan kehendak alam. Baik itu dalam kaitannya dengan politik luar negeri, termasuk juga dalam berdiplomasi. Dalam kasus Aceh, bencana tsunami mendorong pemerintah Aceh untuk bertindak dan mengambil keputusan sesuai dengan kondisi alamnya. Apabila dapat dilakukan dengan baik maka akan memberikan dampak yang cukup baik untuk manusia itu sendiri.

Salah satu wujud dari aktivitas alam adalah terjadinya berbagai macam bencana. Sebagaimana paparan di atas tentang hubungan manusia dengan Alam, pemerintah Provinsi Aceh telah memaksimalkan potensi alamnya dan bertindak juga sesuai dengan tuntutan alam. Dampak nyata pun dapat dirasakan seiring dinamika pelaksanaan hubungan dengan pihak dalam dan luar negeri. Bencana tsunami yang terjadi di Aceh tahun 2004, kini sudah menjadi kekuatan yang dapat digunakan dalam menarik kerjasama di dalam dan luar negeri.

### I. Diplomasi Dalam Penyelesaian Konflik Gam dan RI

<sup>26</sup> Abu Bakar, Eby hara, Phd, *Pengantar Analisis Politik Luar Negeri "Dari Realisme Sampai Konstruktivisme"*, Nuansa, 2011, Bandung

Jika pada masa sebelum tsunami, diplomasi yang dilakukan oleh provinsi Aceh sangat minim dengan pihak mana pun, termasuk dengan dalam negeri. Namun hal berbeda ditunjukkan setelah terjadinya tsunami. Daya tarik Aceh meningkat dan hubungan luar negerinya pun semakin meningkat. Perundingan yang paling alot adalah dalam kasus penyelesaian konflik di Aceh antara GAM dan RI. Masa presiden Megawati Soekarno Putri sempat dilakukan perundingan dengan meneruskan rangkaian perundingan yang dirintis oleh presiden sebelumnya, Abdurrahman Wahid dalam program *Cessation of Hostilities Agreement (CoHA)*, yang dirancang sebagai jalan untuk mengakhiri perang, dan mengembalikan Aceh ke dalam Republik Indonesia, namun praktek ini gagal bahkan Megawati melakukan kesalahan dengan megantikan kegagalan CoHA ini dengan menerapkan Darurat Militer sejak 19 Mei 2003, yang akhirnya bukan menyelesaikan konflik bahkan membuat penyelesaian konflik GAM-RI semakin sulit.

Faktor alam kemudian mendukung percepatan negosiasi ini, yaitu gempa dan tsunami yang melanda Aceh pada 26 Desember 2004. Setelah peristiwa ini, pihak asing dengan mudah masuk ke Aceh (teritorial wilayah Indonesia) dengan alasan kemanusiaan. Pihak asing ini meminta jaminan agar bantuan dapat disalurkan dengan lancar, apabila masih terjadi kontak senjata antara GAM dan TNI maka akan mengganggu pemberian bantuan terhadap korban tsunami. Dengan alasan ini juru runding GAM akhirnya menyatakan bahwa demi kepentingan rakyat Aceh, mereka bersedia berunding. Namun faktor alam ini hanyalah pendukung dan percepat negosiasi, karena jalan untuk menuju perundingan di Helsinki sudah dirintis sejak 2001 oleh Farid Husein atas inisiatif Jusuf Kalla.

Namun untuk kasus ini, bencana tsunami tidak menjadi poin utama penyebab dilangsungkannya perundingan, tsunami hanya menjadi faktor pendukung dan percepatan terjadinya perundingan. Hal ini disebabkan upaya perundingan telah dilakukan sedemikian rupa di tahun-tahun sebelumnya meskipun puncaknya baru terlaksana dan sukses pada tahun 2005 di Helsinki. Pada perundingan tersebut juga akhirnya di bahas tentang langkah-langkah pembangunan yang dilakukan di provinsi Aceh pasca tsunami.

## 2. Diplomasi Aceh dengan Pihak Asing Pasca Tsunami

Setelah di atas kita bahas, salah satu kesuksesan di balik tragedi tsunami dalam diplomasi penyelesaian kasus dalam negeri, kemudian kita akan membahas diplomasi Aceh setelah tsunami dengan pihak asing (internasional). Setelah terjadinya tsunami dan ditandatanganinya perundingan damai di Helsinki ada beberapa perubahan mendasar yang terjadi di provinsi Aceh, terutama dari segi regulasi yang membuat Aceh menjadi lebih leluasa dalam melakukan hubungan luar negeri. Regulasi tersebut antara lain adalah :

### 1. Undang-Undang no. 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh

Undang-undang ini memberikan keleluasaan bagi Aceh untuk mengelola pemerintah di Aceh termasuk dalam memaksimalkan potensi regional untuk meningkatkan kesehatan, keamanan dan kesejahteraan umat.

### 2. Undang-undang No. 37 tahun 2000 tentang pelabuhan bebas di Sabang dan perdagangan bebas

Undang-undang ini juga memberikan wewenang yang sangat luas bagi pemerintah Aceh dalam mengelola potensi alamnya, terutama di kawasan Sabang. Pemerintah mempunyai otoritas yang cukup luas untuk mengelola pajak dan aktivitas import.

### 3. Peraturan pemerintah No. 11 tahun 2010 tentang kerjasama antara pemerintah Aceh dengan institusi luar negeri<sup>27</sup>

Peraturan ini memberikan otoritas yang cukup luas bagi pemerintah Aceh untuk menjalin hubungan luar negeri, terutama dalam urusan pembangunan ekonomi. Seperangkat regulasi ini merupakan indikasi penting peningkatan kekuatan dalam hubungan luar negeri Aceh terutama dalam berdiplomasi dengan berbagai pihak, terutama dalam kerjasama luar negeri.

Berikut ini beberapa kerjasama yang terjalin setelah terjadinya bencana tsunami :

- a. Kerjasama pemerintah Aceh dengan Multi Donor Fund (MDF)
- b. Kerjasama tentang perubahan iklim dan sector kehutanan tingkat para gubernur di berbagai Negara
- c. Pinjaman soft Promotion loan Aceh-Pemerintah Jerman (KFW Bank)
- d. Kerjasama di wilayah IMT-GT antara Indonesia, Malaysia dan Thailand, dari Indonesia salah satu perwakilannya adalah Aceh
- e. Kerjasama dengan Swiscontact dalam segi pertanian

Bencana Tsunami memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap perkembangan provinsi Aceh. Berdasarkan penelitian ada beberapa alur yang mengantarkan kepada peningkatan perkembangan ini. Mulai tahun 1970-an Provinsi Aceh dikenal sebagai daerah rawan konflik dan tingkat keamanannya yang sangat kurang, hal ini diakibatkan oleh kriminalitasnya yang cukup tinggi, perang saudara dalam bingkai separatism antara GAM dan RI. Namun setelah terjadi bencana tsunami pada tahun 2004, dapat menarik banyak simpati dari pihak local maupun luar negeri, yang kemudian melahirkan solidaritas dari pihak tersebut untuk membantu dan memulihkan provinsi Aceh seperti

<sup>27</sup> Dikutip dari selebaran yang buat oleh pemerintah Provinsi Aceh dalam meromosisan daya tarik investasi di Aceh

semula. Lahirlah kesepakatan MoU Helsinki pada tahun 2005, dan bantuan-bantuan pun berangsur datang dari berbagai penjurus dunia untuk membantu Aceh dan yang paling penting dari berkah kesepakatan damai GAM dan RI, tingkat keamanan di Aceh merangsang membaik sehingga menarik pihak lokal maupun asing untuk berkerjasama dan berinvestasi di provinsi Aceh.

Setelah bencana tsunami, dalam banyak kesempatan delegasi dari pemerintahan Aceh ketika menghadiri acara-acara di dalam maupun luar negeri, kerap kali memutar video tsunami dan menjelaskan tentang fenomena yang dialami oleh masyarakat Aceh ketika itu, dengan cara ini ternyata dapat menarik perhatian peserta lain atau bahkan lawan diplomasi untuk membuka diri untuk kerjasama dan berinvestasi di provinsi Aceh. Dengan demikian secara langsung pemerintah provinsi Aceh telah menggunakan bencana tsunami ini menjadi alat diplomasi.

Dari hasil diplomasi ini, banyak hasil yang baik terhadap perkembangan Aceh, salah satunya adalah banyaknya investor yang datang untuk berinvestasi di provinsi Aceh, baik itu dari dalam negeri maupun luar negeri.

Table I. Perkembangan PMA hingga tahun 2013

No.	Tahun	Jumlah Perusahaan
1.	1990	1
2.	1991	-
3.	1992	-
4.	1993	-
5.	1994	2
6.	1995	-
7.	1996	2
8.	1997	1
9.	1998	2
10.	1999	-
11.	2000	2
12.	2001	1
13.	2002	-
14.	2003	-
15.	2004	1
16.	2005	3
17.	2006	1
18.	2007	7
19.	2008	20
20.	2009	26
21.	2010	49
22.	2011	36
23.	2012	21
24.	2013	53

Table I. Perkembangan PMDN hingga tahun 2013

No.	Tahun	Jumlah Perusahaan
1.	1990	3
2.	1991	5
3.	1992	2
4.	1993	1
5.	1994	2
6.	1995	1
7.	1996	5
8.	1997	7
9.	1998	3
10.	1999	2
11.	2000	3
12.	2001	-
13.	2002	1
14.	2003	3
15.	2004	1
16.	2005	2
17.	2006	2
18.	2007	1
19.	2008	-
20.	2009	3
21.	2010	12
22.	2011	137
23.	2012	111
24.	2013	100

Dari tabel di atas dapat dilihat perkembangan yang terjadi di Aceh dari segi investasi dari penanaman modal dalam negeri (PMDN). Hal yang lebih fantastis juga terjadi dari investasi asing di Aceh yang meningkat sangat pesat setelah bencana tsunami.

#### IV. KESIMPULAN

Bencana tsunami memang telah memberikan duka yang cukup besar bagi masyarakat Aceh, namun seiring kebangkitan masyarakat dari duka tersebut, bencana tsunami juga berubah menjadi berkah bagi provinsi Aceh. Hal ini dikarenakan meningkatnya *soft power diplomacy* Aceh sehingga banyak kepentingan dari pemerintahan provinsi Aceh dapat berjalan lancar, baik itu dari segi kerjasama maupun peningkatan di bidang investasi.

Bencana tsunami yang dikaji dalam konsep *disaster diplomacy* ternyata dapat terapkan dengan baik dan sukses di provinsi Aceh, mulai dari terciptanya perdamaian dan kemudian meningkatnya kuantitas dan kualitas diplomasi sehingga melahirkan kerjasama juga investasi di provinsi Aceh.

#### REFERENSI

- [1] Djumala, Darmansjah, *Soft Power Untuk Aceh, Resolusi Konflik dan Politik Desentralisasi*, Jakarta, Pt Gramedia Pustaka Utama, 2013
- [2] Hasan tiro, *Demokrasi Untuk Indonesia*, Jakarta, Teplok Press, 1999
- [3] Kelman, Ilan, *Disaster Diplomacy 'How Disaster affect Peace and Conflict*, New York, Routledge, 2012



- [4] Moch. Nurhasim, *Konflik dan Integrasi Politik GERAKAN ACEH MERDEKA*, Jakarta, Pustaka Pelajar, 2008
- [5] Ishak, Otto, Syamsuddin, *Dari Maaf ke Panik Aceh "Sebuah Sketsa Sosiologi – Politik, Edisi 1*, Jakarta, Yayasan Tifa, 2000
- [6] Ishak, Otto, Syamsuddin, *Dari Maaf ke Panik Aceh "Sebuah Sketsa Sosiologi – Politik, Edisi 2*, Jakarta, Yayasan Tifa, 2008
- [7] Sukawarsini, Djelantik, *Diplomasi antara teori dan praktik*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2008
- [8] Surwandono, Ratih Herningtyas, *Diplomasi Bencana Alam sebagai Saran Meningkatkan Kerjasama Internasional*, Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
- [9] Sjafrizal, *Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Era Otonomi*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2015
- [10] Mukti, Takdir Ali, *Paradiplomasi "Kerjasama Luar negeri oleh PEMDA di Indoneisa"*, The Phinisi Press, Yogyakarta, 2013
- [11] <http://www.porosilmu.com/2015/02/memahami-konsep-soft-power-diplomacy.html>, Diakses pada 27 Februari 2016
- [12] -----, *Dinamika Konflik Dalam Transisi Demokrasi, Informasi potensi Konflik dan potensi integrasi bangsa (Nation and Character Building)*, Deputi Bidang pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga informai nasional Republik Indonesia, 2004